

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Ahmad Almutii Lillah

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Public Policy

Implementation of Public Policy

Development Infrastructure
Program

ABSTRACT

Infrastructure development is essential for community welfare and national economic growth, serving as a long-term investment. This study aims to examine the implementation of the Urban Infrastructure Development Program in Sumedang Utara District, Sumedang Regency. The research uses a qualitative approach, focusing on the dimensions of designed policy, resources, community participation, and involved actors. Informants were selected through purposive sampling, including the Head of Development and Community Empowerment at the district level, Heads of Development in Kotakaler and Situ Urban Villages, and the Community Empowerment Institution (LPM). Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and triangulation. Data validity was tested through credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis was carried out through data collection, reduction, display, and verification. The findings indicate that the program implementation has been fairly effective marked by policy clarity, program relevance, and growing community participation. The support of resources and simple technology further strengthens implementation. However, challenges remain, such as uneven information dissemination, limited understanding of policies, and suboptimal task distribution. Coordination among actors and capacity building for implementers are key areas that need continuous improvement.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ahmad Almutii Lillah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Sumedang.

Email: ahmadmuti45@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Pembangunan Infrastruktur penting bagi suatu negara dikarenakan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Infrastruktur menjadi investasi jangka panjang bagi suatu negara.

Indonesia saat ini tengah dalam masa pembangunan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih baik melalui berbagai program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan yang merupakan jaringan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, karena itu jalan merupakan peranan penting untuk mendukung kegiatan dan menyejahterakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang. Ketersediaan infrastruktur yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat seperti aktivitas petani masyarakat akan terganggu untuk membawa hasil panen, aktivitas pendidikan terganggu di karena kan faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian aktivitas pengendara berdampak rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan buruk, dan berdampak juga terhadap perekonomian.

Oleh karena itu pemerintah dapat memberikan yang terbaik dan memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik yang mana sudah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan sarana yang paling mendasar dan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat demi kelangsungan hidup.

Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan nasional dari pemerintah pusat yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan suatu daerah bahkan negara. Pembangunan sebuah wilayah menunjukkan keberhasilan pemerintah. Pembangunan itu dapat berupa infrastruktur maupun pembangunan manusianya itu sendiri.

Terdapat beberapa infrastruktur rusak yang mengganggu terhadap masyarakat di beberapa kelurahan yang ada di kecamatan sumedang utara.

Tabel 1. Kerusakan Infrastruktur

No	Kelurahan	Infrastruktur Rusak / Bermasalah
1	Kelurahan Kotakaler	Jalan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan Dano mengalami kerusakan
2	Kelurahan Situ	Jalan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan Karapyak sampai ke arah UNSAP di beberapa titik mengalami kerusakan Beberapa bangunan di sekitar kantor BKAD mengalami kerusakan diakibatkan pergerakan tanah
3	Kelurahan Talun	Jalan lingkungan yang ada di sekitar Talun Kidul mengalami kerusakan Kerusakan sistem drainase di beberapa RW

Sumber: Hasil Observasi di Kelurahan & Kecamatan Sumedang Utara 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa beberapa kelurahan di Kecamatan Sumedang Utara mengalami kerusakan infrastruktur, terutama pada jalan lingkungan dan drainase. Kerusakan jalan terjadi di wilayah Dano (Kotakaler), dari Karapyak ke arah UNSAP (Situ), dan Talun Kidul (Talun). Selain itu, Kelurahan Situ juga mengalami kerusakan bangunan akibat pergerakan tanah, serta kerusakan drainase di beberapa RW di Kelurahan Talun. Hal ini menandakan perlunya perbaikan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasi program, faktor-faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi factor yang menghambat implementasi program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi administrasi public dan menjadi bahan pertimbangan praktis dalam peningkatan kualitas manajemen pegawai di lingkungan kecamatan.

2. METHOD

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Metode kualitatif dengan metode inquiry, bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Subjek penelitian menurut Melong dalam Shofa (2020) menjelaskan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) Purposive sampling adalah adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kecamatan)	1
2.	Kasi Pembangunan (Kelurahan Kotakaler)	1
3.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1
4.	Kasi Pembangunan (Kelurahan Situ)	1
Jumlah		4

Untuk pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan Teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu Teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui Teknik berikut:
 - a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto-foto dengan catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
 - d) Triangulasi, yaitu Teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan Teknik yang sama

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi program merupakan tahap ketika rumusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan, pembagian tugas, penggunaan sumber daya, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan infrastruktur kelurahan, implementasi tidak hanya berkenaan dengan penyelesaian keluaran fisik, tetapi juga ketepatan penentuan kebutuhan, keterbukaan penggunaan sumber daya, keterlibatan masyarakat, koordinasi antarpelaksana, kualitas hasil, dan keberlanjutan pemeliharaan. Dengan demikian, keberhasilan program perlu dinilai dari hubungan antara rancangan kebijakan dan kondisi pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada wilayah kelurahan dan Kecamatan Sumedang Utara, serta dokumentasi kebijakan. Data dianalisis secara tematik melalui empat dimensi, yaitu kebijakan yang dirancang, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan aktor yang terlibat. Keempat dimensi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi program relatif berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan pada pemahaman masyarakat, pemerataan pemanfaatan teknologi, kapasitas pelaksana, keluasan partisipasi, dan mekanisme pemeliharaan.

Menurut Merilee S. Grindle (1980), implementasi program dipengaruhi oleh content of policy atau isi kebijakan dan context of implementation atau konteks pelaksanaan. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana, dan sumber daya. Konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik institusi, serta kepatuhan dan respons kelompok sasaran. Kerangka tersebut relevan karena program infrastruktur kelurahan di Sumedang Utara mempertemukan tujuan pembangunan, kapasitas anggaran dan aparatur, kebutuhan warga, serta koordinasi berbagai lembaga pada tingkat lokal.

1) Kebijakan yang Dirancang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program telah diterjemahkan ke dalam indikator yang relatif spesifik dan terukur, terutama target fisik pembangunan dan capaian kegiatan yang digunakan untuk pelaporan serta evaluasi. Kejelasan tersebut membantu pelaksana menentukan pekerjaan, lokasi, waktu, dan hasil yang harus dicapai. Relevansi kebijakan juga dinilai cukup baik karena jenis pembangunan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Temuan observasi berupa perbaikan fisik dan dokumentasi kegiatan menguatkan bahwa rancangan program telah menghasilkan keluaran nyata.

Kejelasan tujuan merupakan prasyarat penting, tetapi rancangan program juga harus menjelaskan sumber masalah, kelompok penerima manfaat, skala prioritas, pembiayaan, standar teknis, dan pemeliharaan. Faradila dan Lutfi (2020) menunjukkan bahwa desain kebijakan dana kelurahan dapat menghadapi masalah ketika nomenklatur, karakter transfer, serta formulasi alokasi tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan khusus pembangunan fisik dan pemberdayaan. Temuan tersebut menjadi pembanding bahwa kejelasan target fisik di Sumedang Utara perlu ditopang oleh ketepatan desain pendanaan dan hubungan yang konsisten antara masalah, instrumen, pelaksana, dan hasil.

Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal tampak dari penggunaan masukan masyarakat dalam penentuan prioritas. Namun, pemahaman warga terhadap isi kebijakan masih belum merata. Sebagian masyarakat lebih mengenal hasil pembangunan daripada dasar penetapan prioritas, keterbatasan anggaran, tahapan pengadaan, atau standar pelaksanaan. Kondisi ini dapat membentuk persepsi bahwa tidak diakomodasinya suatu usulan merupakan bentuk pengabaian, padahal usulan mungkin harus diseleksi berdasarkan urgensi, kewenangan, kelayakan teknis, dan ketersediaan dana.

Karundeng, Kawung, dan Rorong (2022) menemukan bahwa implementasi penggunaan dana kelurahan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan apabila proses perencanaan serta penyalurannya berjalan dengan baik. Karena itu, komunikasi kebijakan di Sumedang Utara perlu menjelaskan bukan hanya daftar kegiatan yang disetujui, tetapi juga kriteria seleksi, alasan penundaan usulan, nilai anggaran, jadwal, pelaksana, serta ukuran keberhasilan. Kejelasan semacam ini memperkuat legitimasi program dan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dengan warga.

Ditinjau dari dimensi isi kebijakan Grindle, program telah memberikan manfaat langsung berupa perbaikan sarana dan prasarana lingkungan. Meski demikian, perubahan yang diharapkan seharusnya tidak berhenti pada selesainya bangunan. Program perlu menetapkan hasil lanjutan, misalnya peningkatan aksesibilitas, pengurangan genangan, perbaikan sanitasi, keselamatan warga, atau kelancaran aktivitas sosial ekonomi. Penambahan indikator manfaat akan membuat evaluasi lebih substantif daripada sekadar membandingkan target dan realisasi fisik.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur yang menentukan apakah rancangan dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan lokal dimanfaatkan secara efisien dan tertib sesuai kebutuhan lapangan. Infrastruktur yang telah tersedia juga dimaksimalkan untuk menunjang pekerjaan. Pemanfaatan sumber daya lokal dapat menekan biaya, mempermudah pasokan, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, sepanjang kualitas bahan tetap memenuhi spesifikasi teknis.

Ketersediaan sumber daya tidak hanya menyangkut bahan, tetapi juga anggaran, tenaga pelaksana, informasi, kewenangan, fasilitas, serta kemampuan mengelola pekerjaan. Syahputra, Purba, dan Damanik (2021) menunjukkan bahwa infrastruktur berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kualitas alokasi dan pelaksanaannya mempunyai konsekuensi lebih luas bagi aktivitas masyarakat. Dalam konteks Sumedang Utara, efisiensi bahan harus berjalan bersama pengendalian mutu, dokumentasi penggunaan, pemeriksaan pekerjaan, dan perencanaan biaya pemeliharaan.

Teknologi sederhana seperti grup WhatsApp dan aplikasi koordinasi telah membantu penyampaian informasi, pendataan, serta komunikasi antaraktor. Penggunaan media tersebut mempercepat pelaporan masalah dan respons terhadap kebutuhan lapangan. Akan tetapi, pemanfaatannya belum merata dan belum seluruhnya dikelola secara sistematis. Informasi penting masih berpotensi terserak dalam percakapan, sulit ditelusuri, atau bergantung pada perangkat pribadi pelaksana.

Pengalaman penerapan konsep smart living di lingkungan perkotaan menunjukkan bahwa teknologi harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia lokal agar dapat diadopsi secara efektif (Sukmawati dkk., 2023). Temuan tersebut menguatkan kebutuhan akan tata kelola informasi yang sederhana tetapi baku, misalnya format laporan digital, penyimpanan dokumen terpusat, daftar progres pekerjaan, dokumentasi foto bertanggal, dan penanggung jawab pemutakhiran data. Teknologi seharusnya memperkuat akuntabilitas, bukan hanya mempercepat percakapan.

Kapasitas aparatur dan pelaksana teknis masih perlu ditingkatkan secara berkala. Wafa, Basri, dan Desmiyawati (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern berkaitan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia di Sumedang Utara perlu mencakup perencanaan kebutuhan, pemahaman aturan, administrasi keuangan, pengawasan mutu, pengelolaan risiko, penggunaan teknologi, dan komunikasi publik.

3) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat telah terlibat terutama melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Masukan warga digunakan sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas program. Keterlibatan ini penting karena warga mengetahui kondisi lingkungan secara langsung, termasuk lokasi jalan yang rusak, saluran yang tidak berfungsi, kebutuhan fasilitas umum, dan risiko yang muncul pada musim tertentu.

Baineo (2021) menemukan bahwa partisipasi dalam pembangunan infrastruktur mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi; sosialisasi, kesempatan berpartisipasi, serta kepemimpinan ikut memengaruhi keterlibatan warga. Mahendra, Maesaroh, dan Widowati (2022) juga menegaskan pentingnya partisipasi pada pembangunan infrastruktur untuk memastikan program sesuai kebutuhan. Dibandingkan dengan kedua penelitian tersebut, partisipasi di Sumedang Utara sudah terlihat pada tahap perencanaan, tetapi perlu diperluas secara lebih konsisten pada pengawasan, evaluasi manfaat, dan pemeliharaan.

Keterbukaan informasi dijaga melalui media sosial, papan pengumuman, serta layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Praktik tersebut memperkuat transparansi karena masyarakat dapat mengetahui kegiatan dan menyampaikan tanggapan. Situmorang, Simanjuntak, dan Elisabeth (2020) menunjukkan bahwa partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi berperan dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang baik. Dengan demikian, media informasi yang tersedia perlu memuat informasi yang relevan dan mudah dipahami, seperti lokasi, anggaran, sumber dana, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, pelaksana, serta saluran pengaduan.

Meskipun komunikasi secara umum terbuka, masih terdapat warga yang kurang aktif. Rendahnya partisipasi dapat disebabkan keterbatasan waktu, kurangnya informasi, persepsi bahwa keputusan telah ditentukan, dominasi peserta tertentu, atau tidak terlihatnya tindak lanjut terhadap usulan. Yuda, Mapparenta, Awaluddin, dan Mallongi (2022) menempatkan partisipasi masyarakat dan proses pemerintah sebagai unsur penting dalam musrenbang. Darin, Moonti, dan Dai (2022) juga menekankan keterlibatan warga dalam musyawarah perencanaan. Oleh karena itu, kualitas partisipasi perlu dinilai dari keragaman peserta, kesempatan berbicara, pengaruh masukan terhadap keputusan, dan umpan balik atas usulan.

Fatimah, Wahyuni, dan Tamrin (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan berbasis kelurahan. Temuan ini relevan karena pembangunan infrastruktur juga membutuhkan rasa memiliki dari warga. Partisipasi yang bermakna dapat dibangun melalui musyawarah pada tingkat RT/RW sebelum musrenbang, survei lokasi bersama, daftar usulan yang dapat dilacak, pelibatan kelompok perempuan dan rentan, serta forum evaluasi setelah pekerjaan selesai.

Partisipasi juga mempunyai fungsi pemeliharaan. Hafrida, Hildawati, Sari, Yanti, dan Afrizal (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Dalam konteks Sumedang Utara, warga dapat dilibatkan untuk melaporkan kerusakan, menjaga fungsi sarana, dan memastikan infrastruktur digunakan sesuai peruntukannya. Peran ini harus diatur secara jelas agar tidak mengalihkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

4) Aktor yang Terlibat

Implementasi program melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pelaksana teknis, RT/RW, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilakukan melalui rapat rutin, komunikasi digital, dan pembagian tugas yang cukup jelas. Sebagian besar aktor memiliki kompetensi dasar yang memadai, didukung pelatihan teknis dan pemahaman terhadap tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi yang berjalan merupakan modal institusional penting karena pekerjaan infrastruktur membutuhkan kesesuaian antara perencanaan, administrasi, teknis, pengawasan, dan penerimaan masyarakat. Sumiyati dan Darsono (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance di tingkat lokal menuntut hubungan antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pemerintahan. Karena itu, koordinasi di Sumedang Utara perlu menghasilkan keputusan yang terdokumentasi, pembagian kewenangan yang tegas, jadwal tindak lanjut, dan mekanisme penyelesaian hambatan.

Potensi miskomunikasi tetap ada ketika informasi teknis tidak dipahami dengan cara yang sama atau perubahan lapangan tidak segera disampaikan kepada seluruh pihak. Firmansyah, Budiman, Adilansyah, Muhamadong, dan Nur (2023) memperlihatkan bahwa pelaksanaan musrenbang membutuhkan komunikasi dan keterlibatan yang nyata agar keputusan perencanaan dapat diterima. Oleh sebab itu, setiap perubahan lokasi, volume, waktu, atau metode pekerjaan sebaiknya dikomunikasikan melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan profesionalitas secara berkala tetap diperlukan. Singal dan Priambodo (2024) menunjukkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi jalan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan yang terkoordinasi. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi aktor bukan hanya kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas dan umur layanan infrastruktur. Pelatihan dapat difokuskan pada penyusunan rencana kerja, pengendalian mutu, keselamatan, pelaporan, pengadaan, mitigasi risiko, dan penanganan pengaduan.

Dalam perspektif konteks implementasi Grindle, komitmen, responsivitas, dan pola hubungan antaraktor menentukan hasil program. LPM dan RT/RW berperan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, sedangkan kecamatan berfungsi dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Peran tersebut perlu dituangkan dalam matriks tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan fungsi.

Secara keseluruhan, implementasi program pembangunan infrastruktur kelurahan di Kecamatan Sumedang Utara telah didukung oleh tujuan yang cukup jelas, pemanfaatan sumber daya lokal, komunikasi berbasis teknologi sederhana, partisipasi melalui musrenbang, keterbukaan informasi, serta koordinasi antaraktor. Hasil fisik yang teramati menunjukkan bahwa kebijakan telah diterjemahkan menjadi kegiatan nyata. Kondisi ini menjadi kekuatan utama pelaksanaan program.

Namun, keberhasilan tersebut belum dapat dinilai hanya dari serapan anggaran dan penyelesaian target fisik. Program masih menghadapi kebutuhan peningkatan pemahaman masyarakat, pemerataan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, keluasan partisipasi, dokumentasi koordinasi, dan pemeliharaan. Zubaidah, Hermansyah, dan Indah (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat partisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Artinya, warga perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai mitra dalam identifikasi masalah, pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan.

Evaluasi pembangunan juga perlu menerapkan prinsip good governance. Nahak, Brain, Ethelbert, Kleden, Indriyati, dan Lawalu (2025) menemukan bahwa kualitas infrastruktur yang tidak merata dan lemahnya pemeliharaan berkaitan dengan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Relevansinya bagi Sumedang Utara ialah perlunya pemeriksaan manfaat pascapembangunan, kanal pengaduan, publikasi informasi proyek, audit sosial sederhana, dan tindak lanjut terhadap kerusakan.

Berdasarkan sintesis tersebut, model implementasi yang disarankan adalah siklus terpadu: identifikasi kebutuhan berbasis data; penentuan prioritas secara partisipatif; penyusunan target keluaran dan manfaat; penyiapan sumber daya dan pembagian peran; pelaksanaan dengan pengendalian mutu; transparansi progres dan anggaran; evaluasi bersama; serta pemeliharaan berkelanjutan. Siklus ini menghubungkan isi kebijakan dengan konteks pelaksanaan sehingga program lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Implikasi praktis penelitian adalah perlunya indikator yang membedakan keluaran, hasil, dan keberlanjutan. Keluaran menunjukkan infrastruktur yang dibangun; hasil menunjukkan perubahan akses, fungsi, keamanan, atau kualitas lingkungan; sedangkan keberlanjutan menunjukkan kondisi dan pemanfaatannya setelah program selesai. Dengan ukuran tersebut, Kecamatan Sumedang Utara dapat memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan dan kehidupan masyarakat.

4. CONCLUSION

Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan telah menunjukkan kemajuan yang cukup positif. Kejelasan indikator kebijakan dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat memperlihatkan bahwa perencanaan telah dilakukan dengan cukup matang. Bukti dukungan seperti dokumentasi kegiatan, laporan hasil musrenbang, dan pencapaian fisik di lapangan memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan yang dirancang mampu menjawab persoalan mendasar di lingkungan masyarakat. Sementara itu, sisi pelaksanaan, ketersediaan sumber daya seperti bahan lokal, infrastruktur, dan dukungan teknologi sederhana turut mendukung efektivitas program. Walaupun begitu, pengelolaan sumber daya dan sistem informasi masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum aktif atau sulit dijangkau melalui media digital. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan telah meningkat, khususnya dalam forum musyawarah dan pelaksanaan kegiatan fisik. Namun, beberapa hambatan masih terjadi, seperti belum meratanya penyebaran informasi, kurangnya pemahaman atas isi kebijakan, serta partisipasi kelompok rentan yang masih minim. Di sisi lain, pembagian peran antar pelaksana mulai terstruktur lebih baik, walaupun kesadaran individu terhadap tanggung jawabnya belum sepenuhnya merata. Koordinasi antar pihak terkait, baik dari unsur pemerintahan maupun lembaga masyarakat, menjadi faktor penting dalam mendorong kelancaran program. Meskipun kompetensi para pelaksana program cukup memadai, masih diperlukan peningkatan kapasitas berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan teknis dan administratif secara efektif.

REFERENCES

- Baineo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i1.2>
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 11–21. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/Article/View/15599>
- Faradila, M., & Lutfi, A. (2020). Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019. *Jurnal Public Policy*, 6(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1762>
- Fatimah, S. S. N., Wahyuni, S., & Tamrin, M. H. (2022). Community Participation In The Successful Community Empowerment Program (Prodamas) In Ngronggo Village, Kediri City. *JKMP: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1681>
- Feis, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218199.
- Firmansyah, Budiman, A., Adilansyah, Muhamadong, & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691615875/politics-and-policy-implementation-in-the-third-world>
- Hafrida, L., Hildawati, Sari, Y., Yanti, M., & Afrizal, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 507–527. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16962>
- Imanuria, F. (2019). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo).
- Karundeng, S. M. A., Kawung, G. M. V., & Rorong, I. P. F. (2022). Implementasi Penggunaan Dana Kelurahan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Madidir Kota

- Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(4), 462–480. <https://doi.org/10.35794/jpekd.44275.23.4.2022>
- Kusdinar, R. (2022). Implementasi Program Akademi Keluarga Jabar Juara Dalam Mencegah Children Stunting Di Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal Of Regional Public Administration*, 7(2), 32–40.
- Kusdinar, R., & Pergiwa, D. I. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Cisitub Kabupaten Sumedang. *PERSPEKTIF*, 10(2), 313–320.
- Mahendra, A., Maesaroh, & Widowati, N. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(1), 163–176. <https://doi.org/10.14710/jppmr.V12i1.37363>
- Nahak, E. D. S., Brain, K. H., Ethelbert, Y. K., Kleden, M., Indriyati, & Lawalu, S. P. A. (2025). Penerapan Good Governance Dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Buraen Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(4), 1551–1560. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1994>
- Nugraha, D. S., Setiawan, A., Agningsih, D. P., Aprilianti, D. N., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal Of Regional Public Administration*, 5(2), 49–59.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data.
- Rahajeng, M. M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.20884/1.Ppmi.2020.4.2.3912>
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal Of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74.
- SEPTIYANI, A. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar (Pip) Pada Jenjang Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (Smp) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang. *Repository Fisip Unsap*, 19(1).
- SINAGA, R. A. H. B. (2023). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli. Serdang Tahun 2021 (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Singal, A. N. H., & Priambodo, B. (2024). Pembangunan Dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan: Dinas PU Bina Marga Dan SDA Kabupaten Sidoarjo. *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 879–891. <https://doi.org/10.52423/Neores.V5i2.273>
- Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.V9i2.2985>
- Sudrajat, A. R., Pranawati, N. W., & Sawitri, N. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang. *JRPA-Journal Of Regional Public Administration*, 5(1), 106–116.
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 46–63. <https://doi.org/10.30742/juispol.V3i2.3485>
- Syahputra, T. S. A., Purba, E., & Damanik, D. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Subulussalam. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.36985/Ekuilnomi.V3i2.261>
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/1976>

-
- Yuda, A. A., Mapparenta, Awaluddin, & Mallongi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Center Of Economic Students Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.56750/Csej.V4i2.414>
- Zubaidah, S., Hermansyah, & Indah, V. (2024). Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 7(1), 69–86. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/Article/View/290>